



ANALISIS MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI SARANA INTERNALISASI LITERASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI SMA ISLAM AL FALAH JAMBI

Ikhsan Hidayat¹, Melisa², Dona Sariani³

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi**

Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km 15, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi

Email: ikhsanhidayat2503@gmail.com, melisa88@unja.ac.id, donasariani@unja.ac.id

Abstrak

PPKn memberikan sarana sebagai salah satu internalisasi pendidikan politik untuk membentuk siswa/i menjadi melek terhadap politik. PPKn juga membentuk siswa/i menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu sebagai warga negara yang mengetahui mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab serta kedudukan politiknya ditengah demokrasi. Dari hasil observasi siswa/i kelas XII SMA Islam Al-Falah Jambi, yang pada praktiknya adalah merupakan pemilih pemula belum memahami pendidikan politik dengan baik. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula di SMA Islam Al Falah Jambi. Berdasarkan hasil penelitan menggunakan indikator literasi politik Madhok dengan empat indikator, yaitu (1) kesadaran akan pentingnya aktivitas politik, (2) kemampuan membuat opini tentang proses politik, (3) mengetahui kebijakan pemerintah, (4) ikut serta aktif dalam politik bahwa peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula di SMA Islam Al Falah Jambi kurang optimal dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran jarang dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan bermasyarakat, mata pelajaran PPKn sebagai internalisasi literasi politik tentang pengetahuan konsep politik dan demokrasi cukup baik, tetapi untuk beropini proses politik, pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan partisipasi politik masih kurang untuk itu diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih kontekstual dan dialogis agar literasi politik pemilih pemula dapat terbangun secara optimal melalui mata pelajaran PPKn.

Kata Kunci: Mata Pelajaran PPKN, Literasi Politik, Pemilih Pemula

Abstract

Civics and Citizenship Education (PPKn) provides a means of internalizing political education to develop students' political literacy. PPKn also shapes students into good and intelligent citizens, namely citizens who understand their rights, obligations, responsibilities, and political standing in a democracy. Observations from grade XII students at Al-Falah Islamic High School in Jambi, who are often first-time voters, show that they do not yet understand political education well. This study aims to determine the role of PPKn as a means of internalizing political literacy among first-time voters at Al-Falah Islamic High School in Jambi. Based on the results of research using Madhok's political literacy indicators with four indicators, namely (1) awareness of the importance of political activities, (2) the ability to form opinions about the political process, (3) knowing government policies, (4) actively participating in politics, the role of PPKn subjects as a means of internalizing political literacy for new voters at Al Falah Islamic High School, Jambi is less than optimal, which can be seen from learning activities that are rarely directly linked to students' real experiences in community life, PPKn subjects as internalization of political literacy about knowledge of political concepts and democracy are quite good, but to express opinions about the political process, knowledge about government policies and political participation is still lacking, therefore more contextual and dialogical learning innovations are needed so that the political literacy of new voters can be built optimally through PPKn subjects.

Kata Kunci: PPKN subjects, Political Literasi, Beginner Selector

1. PENDAHULUAN



Pemilih pemula merupakan seorang remaja yang telah memasuki usia pemilihan serta pertama kali menggunakan hak pilih individunya buat ikut serta berperan aktif dalam kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan dengan rentang usia 17 – 21 tahun di masa pemilihan yang siklusnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali (Matnuh, 2024: 41). Pemilih pemula biasanya adalah warga negara yang tengah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemilih pemula diperlukan memiliki peran aktif dalam berjalannya proses politik, baik dalam pemilihan umum ataupun melalui segala bentuk partisipasi dalam politik seperti aksi sosial dan segala bentuk berlakunya proses dalam politik.

Pemilih pemula mempunyai masalah yang sangat penting pemilih pemula sering menghadapi kurangnya literasi politik ditengah kebimbangan yang mereka miliki maka akan semakin besar potensi pemilih pemula buat melakukan golput yang sering dikaitkan dengan permasalahan yang muncul dalam problem politik. Selain golput, timbul pula konflik lain tentang pandangan politik di pemilih pemula. Kenyataan apatisme terhadap politik dan sikap skeptis terhadap pemerintah ialah permasalahan lain yang ada ssebab kurangnya kemampuan pemahaman terhadap politik (Bakti, 2017: 44).

Salah satu cara yang bisa dilakukan buat menyampaikan pemahaman politik pada pemilih pemula adalah dengan memberikan pendidikan politik (Arif, 2023: 112), yang dalam dunia sekolah terangkum dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya pendidikan ini adalah untuk menyampaikan kesadaran dan mewujudkan generasi melek politik dan memiliki kesadaran politik yang baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana proses-proses politik melalui pendidikan politik.

PPKn merupakan sarana salah satu internalisasi pendidikan politik untuk menghasilkan peserta didik menjadi melek terhadap politik. Selain itu PPKn juga membentuk siswa/i sebagai masyarakat negara yang baik dan cerdas, yaitu sebagai warga negara yang mengetahui mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab serta kedudukan politiknya ditengah demokrasi dan hiruk pikuk proses hingga kebijakan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

PPKn secara ideal sudah menerapkan nilai, moral dengan kebutuhan warga negara (Mahardika, 2024: 56). PPKn penting untuk mengajarkan literasi politik bagi peserta didik sebagai pemilih pemula. Literasi politik memiliki kiprah yang sangat penting untuk mempertinggi partisipasi dalam pemilihan umum (Isyanawulan, 2023: 33). Dengan



pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban yang siswa/i miliki, maka dibutuhkan juga motivasi siswa/i menjadi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan dan terlibat dalam aktivitas politik lainnya. Materi-materi yang berkaitan dengan politik ada pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas F XII yaitu pada Bab Demokrasi dan Pemilihan Umum. Bab ini menjelaskan tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Materi-materi dalam mata pelajaran PPKn tersebut belum sepenuhnya membuat siswa-siswi melek politik.

Jumlah pemilih untuk Provinsi Jambi yang langsung disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi dalam kegiatan *Talkshow* “Pemilih Pemula Penentu PILKADA 2024” tanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan di UIN Sultan Tahaha Saifuddin, Jambi: Sebanyak 25% pilkada akan diikuti oleh pemilih pemula atau sebanyak 683.792 jiwa pemilih dalam pilkada 2024 adalah berasal dari Gen Z yang diantaranya adalah pemilih pemula. Oleh karena itu, selanjutnya untuk memperkuat data penelitian pada penelitian ini, maka penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data awal mengenai literasi politik pemilih pemula menggunakan indikator literasi politik Madhok oleh Ridha (2020: 114) dengan empat indikator literasi politik, yaitu (1) kesadaran akan pentingnya aktivitas politik, (2) kemampuan membuat opini tentang proses politik, (3) mengetahui kebijakan pemerintah, (4) ikut serta aktif dalam politik, hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa/i kelas XII SMA Islam Al-Falah Jambi, yang pada praktiknya adalah merupakan pemilih pemula belum memahami pendidikan politik dengan baik. Seharusnya dengan adanya materi- materi yang terdapat dalam mata pelajaran PPKn, siswa-siswi Fase F XII SMA Islam Al Falah Jambi sebagai pemilih pemula sudah bisa memahami tentang pendidikan politik untuk itu diperlukan literasi politik atau melek politik.

Penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Yuliandari, Moh. Muchtarom, Pipit Widiatmaka (2023), berfokus pada pendidikan politik melalui penguatan literasi digital dalam proses pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian ini pendidikan politik melalui literasi digital dalam mata kuliah pendidikan politik sangat efektif dan efisien. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Akhyar Ansori (2023), penelitiannya mengkaji tentang dampak literasi politik dan pemilu 2024 bagi pemilih pemula terhadap pengendalian hoax. Hasilnya terdapat kontribusi positif literasi politik dan pemahaman pemilu dalam pengendalian informasi hoax. Kedua penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, penelitian yang dibuat oleh Erna Yuliandari dkk



tidak mengkaji mata pelajaran PPKn di tingkat SMA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ansori tidak mengkaji tentang internalisasi literasi politik sehingga penelitian sangat penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pada pemilih pemula di SMA.

Berdasarkan fenomena - fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembelajaran PPKn dengan realitas literasi politik siswa di lapangan, yang kemudian menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menganalisis lebih dalam peran mata pelajaran PPKn dalam membentuk literasi politik di tingkat SMA, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Mata Pelajaran PPKn Sebagai Sarana Internalisasi Literasi Politik Pemilih Pemula di SMA Islam AL-Falah Jambi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula di SMA Islam Al – Falah Jambi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan, saran dan masukan yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pendidikan politik di sekolah khususnya SMA Islam Al-Falah Jambi dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Menurut (Murdiyanto, 2020:29), pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali makna di balik suatu peristiwa yang dialami seseorang, lengkap dengan konteks unik yang melingkupinya. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu memaknai peristiwa tersebut, bahkan hingga ke tingkat keyakinan pribadi. Jenis penelitian ini berupaya menangkap esensi psikologis dari pengalaman tersebut melalui eksplorasi mendalam berdasarkan kehidupan sehari-hari subjek. Peneliti menggunakan jenis fenomenologi dalam penelitian ini untuk menggali pengalaman siswa dalam memahami politik melalui PPKn.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana informan sengaja ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan terdiri dari siswa kelas XII Fase F, guru PPKn, dan kepala sekolah di SMA Islam Al Falah Jambi. Data dikumpulkan melalui tiga metode: observasi langsung, wawancara mendalam, dan



pengumpulan dokumen. Merujuk pada (Sugiyono, 2020:241), triangulasi dipahami sebagai metode menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk memperoleh keabsahan informasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber. Sementara itu, proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap: mereduksi data yang diperoleh, menyajikannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan. Hal ini penulis gunakan untuk melihat bagaimana peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik di SMA Islam Al Falah Jambi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti, maka dapat diuraikan hasil reduksi data terkait dengan mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula di SMA Islam Al Falah Jambi. Untuk mendapatkan data yang tepat peneliti menggunakan indikator literasi politik madhok, yaitu kesadaran akan pentingnya aktivitas politik, kemampuan membuat opini tentang proses politik, mengetahui kebijakan pemerintah, ikut serta aktif dalam politik.

1. kesadaran akan pentingnya aktivitas politik.

PPKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekkan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awarenees*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi ((Matnuh et al., 2024:44). Hasil wawancara dengan siswa F XII, sebagian dari siswa ada yang bisa menjelaskan konsep politik dan demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara tetapi ada juga dari mereka tidak bisa menjelaskan konsep politik dan demokrasi serta hak dan kewajiban warga negara menurut siswa hak memilih pemimpin jika dalam pemilu, hak memilih pada saat pemilihan ketua OSIS dan kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah mematuhi peraturan dan membayar pajak. Jadi pemahaman siswa terhadap konsep politik dan demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara hanya mereka tahu sebatas konsep saja, mereka belum bisa memahami lebih dalam lagi tentang politik dan demokrasi, bisa disimpulkan kesadaran akan pentingnya aktivitas politik sudah ada tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Peneliti menyimpulkan bahwa peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula yang termuat pada materi mengenai demokrasi, pemerintahan, dan hak serta kewajiban warga negara menjadi pintu masuk awal bagi siswa



untuk memahami pentingnya keterlibatan politik. Penelitian ini juga di dukung oleh pendapat Muhamad Tarom (Tarom et al., 2023:113) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai wadah pembelajaran politik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami lebih dalam berbagai dimensi hak dan kewajiban sebagai warga negara, guna membekali mereka menghadapi masa depan. Sejalan dengan pendapat Eka Sitiyawati Abidin (2024:75) bahwa Pendidikan politik terstruktur di sekolah memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran politik. Melalui kurikulum yang mencakup materi tentang hak-hak warga negara, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai demokrasi, generasi muda dibekali dengan pengetahuan yang mendukung keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan berbangsa.

2. Kemampuan membuat opini tentang proses politik.

Literasi politik tidak hanya mencakup pemahaman konsep, tetapi juga melibatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam ranah politik, seperti menyampaikan pendapat dengan alasan yang masuk akal, menghargai perspektif orang lain, serta ikut serta dalam dialog politik yang santun dan konstruktif (Rasyid, 2023:28). Opini publik mencerminkan pandangan kolektif sekelompok orang terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. Opini publik mencakup persepsi, penilaian, dan keyakinan yang dianut individu dalam masyarakat, khususnya terkait kebijakan pemerintah, dinamika politik, dan isu-isu sosial. Opini kolektif ini biasanya diungkapkan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, forum diskusi, dan platform digital. Opini publik bersifat dinamis, karena dapat berubah seiring perkembangan situasi politik, sosial, atau ekonomi (Rahmadi et al., 2024:246). Dari hasil wawancara dengan siswa fase F XII bahwa sebagian dari mereka berpendapat perlu untuk beropini dan sebagian lagi mereka tidak merasa perlu untuk beropini, mereka merasa belum saatnya mereka beropini politik lebih mendalam membahas tentang politik. Tidak semua siswa menunjukkan minat beropini tentang proses politik terdapat juga siswa yang tidak tertarik berdiskusi mengenai isu politik. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap politik, keterbatasan pengetahuan, serta pengalaman pribadi yang belum relevan dengan dunia politik. Penelitian ini di dukung oleh pendapat esti rahmayanti (2023:420) bahwa Beberapa siswa masih memiliki pandangan kurang positif terhadap politik; beberapa menganggap politik menakutkan dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa PPKn berperan dalam memberikan pengetahuan, melatih berpikir kritis, dan nilai demokrasi, walaupun hanya sebagian kecil siswa saja yang tertarik untuk beropini politik, banyak siswa kurang percaya diri dan enggan menyampaikan pendapat



menunjukkan rendahnya keberanian berpartisipasi dalam ruang demokrasi, untuk itu perlunya upaya lebih lanjut agar siswa terdorong untuk aktif dan peduli terhadap isu-isu politik dan menjadikan pembelajaran PPKn lebih menarik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ida Mahardika (2024:58), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan krusial dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi politik, membentuk opini, dan meningkatkan kesadaran politik, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

3. Mengetahui kebijakan pemerintah

Seseorang yang memiliki literasi politik cenderung mampu memahami berbagai isu politik yang menjadi perhatian publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemahaman ini mencakup isu kebijakan, dinamika politik, bahkan isu kontroversial (Rasyid, 2023:28). Dari hasil wawancara, siswa mengetahui kebijakan pemerintah seperti wajib belajar SD hingga SMA, Kurikulum merdeka mereka merasa senang dengan kurikulum merdeka yang diterapkan pemerintah karena mereka merasakan manfaat dari kegiatan proyek kurikulum merdeka, ada juga siswa yang merasakan manfaat kebijakan pemerintah dari bantuan dana pendidikan (KIP).

Mereka tahu kebijakan pemerintah untuk pendidikan karena mereka dapat merasakan langsung kebijakan pemerintah tersebut. Selain itu minimnya pemahaman tentang pentingnya kebijakan di bidang lain seperti ekonomi, lingkungan membuat mereka menganggap topik - topik tersebut tidak relevan. Kurangnya informasi yang disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai usia juga membuat siswa sulit memahami atau peduli terhadap kebijakan publik secara luas. Akibatnya rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap isu-isu nasional di luar dunia pendidikan menjadi terbatas. Guru PPKn mengaitkan pembelajaran PPKn dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah. Dengan cara ini siswa bisa melihat langsung bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka lebih memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan serta kewajiban mereka sebagai pelajar.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik pemilih pemula dengan mengkaitkan kebijakan pemerintah belum optimal karena hanya kebijakan pendidikan saja yang dipahami siswa, seharusnya PPKn mengkaitkan juga dengan kebijakan – kebijakan publik sehingga dapat menambah wawasan literasi politik siswa. Pendapat ini di dukung oleh penelitian Matnuh (2024:42) Pembelajaran PPKn masih



memiliki keterbatasan dalam memberikan pemahaman politik yang menyeluruh bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Eka Sitiyawati Abidin (2024:76) bahwa Kaum muda cenderung lebih tertarik pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Ketika isu-isu ini dikaitkan dengan urgensi keterlibatan politik, mereka merasa lebih terhubung dan terdorong untuk berpartisipasi. Dengan demikian, mereka memahami bahwa keterlibatan mereka memiliki dampak nyata terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

4. Ikut serta aktif dalam politik

Pemilih yang memiliki pemahaman politik cenderung lebih antusias dalam menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, seperti kampanye, diskusi publik, dan forum debat. Tingkat literasi politik yang tinggi juga berperan dalam meminimalkan risiko manipulasi dan kondisi selama pemilu. Mereka yang memahami seluk-beluk strategi politik, bahasa persuasif, dan teknik propaganda umumnya lebih waspada terhadap berbagai bentuk misinformasi dari kandidat atau partai tertentu. Dengan kesadaran ini, mereka mampu mengenali janji-janji politik yang tidak realistis dan menilai substansi kebijakan secara lebih kritis (Rasyid, 2023:37). Partisipasi politik pada hakikatnya adalah keterlibatan individu dan kelompok dalam kegiatan politik, baik melalui pemilihan pemimpin nasional maupun melalui cara lain yang dapat memengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk nyata partisipasi ini adalah pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan umum (Desa & Bernard, 2021:3).

Dari hasil wawancara dengan siswa Fase F XII tentang berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS mereka mengatakan pernah mengikuti pemilihan ketua OSIS dan mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. Namun Untuk menggunakah hak pilih dalam pemilu seperti pilpres atau pilkada sebagian siswa ingin menggunakan hak pilih mereka karena mereka tidak ingin golput tetapi sebagian lagi menjawab belum tau mau menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih mereka, mereka merasa belum yakin untuk menggunakan hak pilih mereka, mereka merasa jika tidak ikut memilih pun tidak jadi masalah selain itu mereka juga ingin tahu dulu siapa yang akan mereka pilih nanti.

Peneliti menyimpulkan bahwa untuk kegiatan demokrasi di sekolah dalam bentuk pemilihan OSIS siswa sudah berpartisipasi, tetapi siswa sebagai pemilih pemula pada saat nanti hak pilih mereka sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum dalam menentukan



pilihannya masih bingung dan labil hal ini menunjukkan bahwa siswa sebagai pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan, pemahaman siswa tentang sistem politik dan pentingnya peran warga negara dalam demokrasi terutama pilpres atau pilkada masih kurang. Sejalan dengan pendapat Adnan Pattipeilohy (2018:136) bahwa Ketidaktahuan dan keterbatasan pengalaman di bidang politik sering kali menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan saat memberikan suara. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Allen Beck dalam penelitian Adnan Pattipeilohy (2018) bahwa Tingkat pengaruh sosialisasi politik terhadap setiap individu tidaklah seragam, sebab dipengaruhi oleh seberapa intens seseorang berinteraksi dengan media sosialisasi, seberapa dalam ia memahami prosesnya, dan faktor usia juga turut berperan.

Penelitian ini didukung pendapat dari Agus Sutisna (2017:267) bahwa Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada dasarnya masih tergolong sebagai pemula dalam dunia politik. Mereka membutuhkan pembekalan melalui pendidikan politik agar memiliki tingkat literasi politik yang setidaknya memadai. Karena itu, diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan mereka. Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn sebagai sarana internalisasi literasi politik kurang optimal dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran jarang dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan pembelajaran tidak ada simulasi pemilu, tidak ada studi kasus, tidak ada debat, sehingga pemahaman siswa masih sebatas konsep atau pengetahuan permukaan saja tanpa analisis kritis. Tingkat kesadaran pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya turut dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan dan pendidikan politik yang telah mereka peroleh. Di dukung oleh pendapat Hasanah dan Sulha (2023:49) bahwa untuk melaksanakan dan mengoptimalkan proses sosialisasi politik, diperlukan strategi yang tepat serta pemilihan ruang atau forum yang tepat dalam pelaksanaannya. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dasar bagi terciptanya politik yang demokratis. SMA Islam AL Falah Jambi mendukung kegiatan demokrasi. Sekolah melakukan sosialisasi politik baru sebatas mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), kegiatan Projek P5 dilaksanakan untuk pemilihan OSIS dan belum ada kerjasama dengan KPU.

4. PENUTUP



Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Bagaimana Mata Pelajaran PPKn Sebagai Sarana Internalisasi Literasi Politik Pemilih Pemula di SMA Islam Al Falah Jambi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Hasil wawancara dengan siswa Fase F XII, Guru Mata Pelajaran PPKn dan Kepala Sekolah SMA Islam Al Falah Jambi, mata pelajaran PPKn sebagai internalisasi literasi politik tentang pengetahuan konsep politik dan demokrasi cukup baik, tetapi untuk beropini proses politik, pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan partisipasi politik masih kurang.

Disarankan kepada siswa fase F XII SMA Islam Al Faalah Jambi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas politik, kemampuan membuat opini tentang proses politik, mengetahui kebijakan pemerintah, dan ikut serta aktif dalam politik. Berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi agar siswa siap menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran berpolitik yang baik di masa depan. Kepada guru Mata Pelajaran PPKn untuk lebih sering menggunakan diskusi, debat, dan simulasi pemilu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, berargumen, berpikir kritis, menghormati perbedaan pendapat. Peran kegiatan demokrasi di sekolah sangat penting karena dapat menjadi sarana bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Sekolah perlu untuk memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan fasilitas, seperti penyediaan media pembelajaran politik (simulasi pemilu, diskusi isu publik, program kerjasama dengan KPU).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Anita, F., Kenepri, K., Putra, R. E., & Iballa, B. D. M. (2023). Literasi Politik Pemilih Pemula Menyongsong Pemilu 2024 di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Desa Sungai Pinang. *Jdistira*, 2(2), 110–115. <https://doi.org/10.58794/jdt.v2i2.386>
- Bakti, A. F. (2017). *Literasi Poliik dan Kampanye Pemilu*.
- Desa, A., & Bernard, F. (2021). *Jurnal humanism*. V(2), 1–8.
- Isyanawulan, G., Yulasteriyani, & Hendarso, Y. (2023). Pendidikan Literasi Politik Untuk Siswa SMA Negeri 25 Kabupaten Banyuasin. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 33–38. <https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v2i1.156>
- Mahardika, I. (2024). *Pemahaman Literasi Politik Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pandeglang*. 1(2), 1–6.
- Matnuh, H., Fahlevi, R., Kiptiah, M., & Anisa, F. (2024). Internalisasi Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(01), 40–45.



- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press.
- Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Marga, U. P., Dringu, R., Mayangan, K., Probolinggo, K., & Timur, J. (2024). *Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024*. 4(1).
- Rasyid, F. A. (2023). *Membangun literasi politik melalui pendidikan untuk pemilu yang bermartabat*.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tarom, M., Info, A., Voter, N., & Education, C. (2023). *Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula*. 8(2), 108–113.